

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE POLDA METRO JAYA DAN DIREKTUR BNPT

I. Penjelasan Kapolda Metro Jaya

1. Jenis-jenis kriminalitas yang marak terjadi di Provinsi DKI Jakarta:
 - Kriminalitas yang marak terjadi di DKI Jakarta, angka kejahatan di Tahun 2016 jumlahnya 29.372 kasus kemudian turun pada Tahun 2017 sebanyak 20.793 kasus, data Bulan Januari hingga Bulan Mei 2018 terjadi sebanyak 8.100 kasus.
 - Selama SP3 dilakukan atas dasar keadilan jangan takut untuk dilakukan guna memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
 - Sejauh ini tidak ada hambatan yang berat dalam hal penanganan kasus hukum yang terjadi, saat ini kejahatan yang kerap terjadi adalah kasus Begal.
2. Kesiapan Pengamanan Asian Games :
 - Membentuk tim selama satu bulan dan melaksanakan operasi Among Raga 2018 dalam rangka cipta kondisi pengamanan Asian Games.
 - Mengharapkan pelaksanaan Asian Games dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada aksi serangan terorisme.
 - Sejak kejadian serangan bom pada Bulan Mei di Surabaya dan di Rutan Kelapa Dua Depok, Polda meningkatkan pengamanan dan kemudian memindahkan tahanan terpidanan kasus terorisme ke Nusakambangan.
 - Jajaran Polda Metro Jaya melaporkan telah siap melakukan pengamanan Asian Games mulai tanggal 1 Agustus hingga 4 September 2018, sebanyak 13.754 personil Kepolisian disiapkan untuk pengamanan Asian Games.
 - Bekerjasama dengan *stakeholders* lainnya seperti TNI, Pemda, Dishub, terutama dalam hal pengawalan kontingen Negara Peserta Asian Games.
 - Ada tiga kebijakan yang akan diterapkan oleh Polda : 1) Pengangkutan lalu lintas angkutan barang; 2) Pengamanan dan rekayasa lalu lintas, yaitu memperpanjang waktu ganjil dan genap sebab ada peraturan dari Komite Asian Games yaitu jarak tinggal peserta dengan stadion harus dapat ditempuh dalam 35 menit; dan 3) Penyediaan angkutan umum.
3. Tingkat Pelanggaran Disiplin oleh Jajaran Polda Metro Jaya :
 - Sampai dengan Juni 2018 pelanggaran disiplin sebanyak 57 kasus, pelanggaran kode etik profesi sebanyak 61 kasus, dan pelanggaran tindak pidana 21 kasus. Penerapan reward dan punishment harus konsisten ditegakkan sesuai dengan prestasi dan pelanggaran yang dilakukan.
 - Polda Metro Jaya memiliki yurisdiksi di tiga wilayah yaitu DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Pada saat Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 melaksanakan Operasi Mantap Praja Jaya 2018 dan berjalan lancar, saat ini telah memasuki tahap rekapitulasi perhitungan suara dan logistik kotak suara Pilkada sudah diserahkan kepada KPU Provinsi.

II. Penjelasan Dir. BNPT, diantaranya sebagai berikut :

1. Program-program yang diterapkan BNPT untuk Pendidikan Dasar dan Menengah :

- BNPT akan bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenag dalam penambahan guru-guru Agama. Karena di beberapa Daerah terdapat kekurangan guru-guru Agama dan terkadang guru Agama yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi.
 - BNPT akan bekerjasama dengan Kemendikbud, Kemenag, dan Ormas Islam memberikan pelatihan kepada guru Agama dalam memberikan pemahaman Agama yang Moderat/Wasatiah baik guru Agama yang Islam maupun non Islam.
 - Memberikan pelatihan kepada guru Kewarganegaraan melalui peningkatan Wawasan Kebangsaan.
 - Meningkatkan Kurikulum yang memadai untuk mata pelajaran Agama dan Wawasan Kebangsaan baik dari tingkat Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas.
 - Memberikan peningkatan pelatihan dan pembuatan video pendek untuk Pelajar Menengah Atas sebagai bentuk Kontra Narasi serta memberikan pemahaman anti Intoleransi dan Anti Radikalisme.
 - Memberikan pemahaman tentang bahaya dan ancaman Radikalisme kepada Pelajar serta guru, sta pengajar di Lingkungan Sekolah dalam bentuk sosialisasi.
 - Mendorong Kemendikbud, otoritas sekolah untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai, staf pengajar, kegiatan internal dan lingkungannya agar terhindar dari penyebaran radikalisme.
2. Program-program yang diterapkan BNPT untuk Pendidikan Tinggi :
- Mendorong Kemenristekdikti meningkatkan mata kuliah agama yang komprehensi dan moderat serta meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan yang optimal.
 - Memberikan pencerahan kepada mahasiswa baru tentang pemahaman intoleran dan radikal serta melakukan pengawasan terhadap proses Ospek.
 - Mendorong Kemenristekdikti serta otoritas kampus untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai, dosen, dan kegiatan kampus agar terhindar dari penyebaran radikalisme.
 - Membentuk Duta Damai yang tersebar di 10 Provinsi dengan jumlah 600 orang.
 - Melaksanakan program dialog bersama dengan CSO terkait radikalisme di lingkungan pendidikan.
 - Memberikan masukan kepada para Rektor dan Birokrasi Kampus tentang bagaimana melakukan proses pencegahan masuknya paham radikal di dalam kampus.
 - Meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan komitmen empat konsensus dasar hidup berbangsa dan bernegara.
 - Mendorong Ormas Moderat seperti NU, Muhammadiyah untuk membangun Ponpes Moderat disekitar kampus besar sebagai tempat belajar agama bagi mahasiswa yang haus akan pemahaman agama.
3. Efektivitas pelaksanaan program deradikalisasi di berbagai Lapas bekerjasama dengan Kemenkumham :
- Kebijakan Kemenkumham dalam melakukan pemisahan dan pemutusan jaringan dengan menempatkan narapidana terorisme di berbagai lapas seluruh Indonesia berimplikasi pada jumlah lapas yang semakin banyak dengan jarak berjauhan dan banyak jaringan terorisme yang berafiliasi dengan jaringan ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*) dan cenderung memiliki pemahaman radikal, tidak kooperatif dalam pembinaan dan enggan menyatakan ikrar kesetiaan terhadap NKRI.

- Saat ini BNPT dan Lapas mendukung program deradikalisasi dengan melibatkan para wali masyarakatan dimulai dari tahapan identifikasi, melakukan pencatatan dan penggalian informasi sesuai format yang disusun bersama berdasarkan kebutuhan dasar program pembinaan.
 - BNPT dalam tahap rehabilitasi bekerjasama dengan lapas dan berkoordinasi dengan FKPT mengenai pelibatan narasumber lokal yang dapat mewujudkan program yang efektif.
 - Deradikalisasi tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilakukan secara menyeluruh melalui simulasi, modifikasi, dan intervensi yang tepat. Oleh sebab itu akan dibentuk Pokja dengan berdasar prinsip kehati-hatian dalam menentukan sasaran; memilih narasumber; dan evaluasi.
4. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT :
- Secara legal formal kedudukan FKPT adalah mitra strategis BNPT dengan dasar pembentukan adalah keputusan kepala BNPT. Menjadikan keberadaan FKPT mengandalkan pembiayaan oleh BNPT untuk kegiatan yang dilaksanakan. Situasi ini menjadikan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKPT sementara waktu berpusat di ibukota provinsi dan kota-kota penyangga.
 - Keterbatasan anggaran BNPT untuk pencegahan terorisme melalui FKPT menjadikan anggaran yang tercover hanya sebatas kegiatan. Dana pendukung misalnya ATK dan keperluan administrasi masih mengandalkan peralatan pribadi pengurus FKPT.
 - Jumlah personil yang ada kurang dibandingkan dengan beban kerja sehingga perlu pelatihan tambahan.
 - Pagu anggaran masih kurang untuk melaksanakan program kegiatan.
5. Pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya:
- BNPT dengan itens melakukan koordinasi dengan Criminal Justice System dalam meningkatkan kegiatan menyamakan persepsi dengan Jaksa sekaligus Penyidik Densus 88 agar penanganan pasca serangan teroris dapat dilakukan dengan lebih efektif.
 - BNPT melibatkan LPSK dan Lembaga Perlindungan Anak sebab perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus.
 - Melakukan program deradikalisasi bersama Tim Densus 88 terhadap wanita dan anak yang terlibat tindak pidana terorisme.
 - Memberikan pemahaman terhadap takmir Masjid atau Mushola yang pernah dijadikan tempat radikalisasi oleh pelaku dan melakukan pengawasan terhadap pengajian-pengajian yang berlangsung.
6. Langkah strategis dan terobosan yang dilakukan oleh BNPT :
- BNPT sebagai koordinator yang akan menjembatani semua Stake Holder yang terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme sesuai UU yang baru.
 - BNPT akan menyusun penguatan strategi kontra narasi, ideologi, radikalisasi, dan propaganda di dunia maya melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi.
 - BNPT menambah duta damai keseluruh Provinsi,
 - BNPT akan membangun sinergi strategis dengan penggiat dunia maya dalam pencegahan terorisme dalam masyarakat.
 - BNPT akan menjalin kemitraan strategis dengan media dan CSO melalui kampanye anti terorisme.
 - Meningkatkan nilai kearifan local di masing-masing Provinsi.

- Bekerjasama dengan TNI, POLRI, KEMENAG dalam emningkatkan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Penyuluh Agama dalam mencegah masuknya paham radikal di masyarakat.
- Bekerjasama dengan mantan ideology teroris yang sudah moderat untuk memodernisasi ideologi ekstrim.
- Meningkatkan koordinasi pengawasan terhadap bahan dasar pembuatan bahan peledak yang sering digunakan.

III. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Koordinasi antara BNPT dengan Kepolisian terlihat sudah saling berkaitan.
- Untuk BNPT apa yang disiapkan dalam rangka pengamanan dan program deradikalisasi yang dilakukan.
- Ingin mendapatkan penjelasan dari BNPT terkait program deradikalisasi, tetapi melihat program ini belum berhasil masi hada pengeboman di Jawa Timur dan pelakunya adalah mantan napi, ingin meminta penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi?
- Mencermati paparan yang telah disampaikan dan dapat memahami ada poin yang harus disampaikan terkait pelaksanaan Asian Games, patut dicermati suasana di beberapa daerah kurang menguntungkan adanya serangan teror, perlu adanya antisipasi sedini mungkin sehingga tidak hanya fokus pada kelancaran lalu lintas melainkan juga pada gangguan keamanan, bagaimana pola pengamanan yang berlapis pada Asian Games mulai dari persiapan hingga kepulangan para atlet.
- Keamanan di Polda Metro berjalan baik sejauh ini, apabila dilihat dari Pagu indikatif Kepolisian 76,9 T dengan usulan penambahan anggaran sebesar 44.4 T.
- Perlu adanya peningkatan kinerja BNPT terhadap tindakan preventif dan program deradikalisasi.
- Mengharapkan adanya hal-hal yang spesifik yang disampaikan oleh BNPT. Apakah penyediaan guru Agama masuk ranah BNPT? Apa kebijakan yang signifikan dari BNPT? Target yang ingin dicapai BNPT dan sejauh mana pencapaian BNPT hingga saat ini?
- Masalah penyerangan di Markas Brimob, sejauh mana Kepolisian dan BNPT mengetahui adanya indikasi penyerangan?
- Persoalan ganjil genap banyak keluhan dari masyarakat yang waktunya diperpanjang, bagaimana solusi untuk masyarakat?
- Persoalan narkoba apakah saat ini ditemukan adanya orang/pemain baru dan bagaimana upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan kepolisian dalam memberantas narkoba?
- Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada saat mudik lebaran?
- Pengamanan Asian Games tidak mengharakan adanya isu atau kendala yang dapat menghambat pelaksanaan Asian Games. Bagaimana BNPT berperan dalam ikut mengamankan Asian Games dan melihat program kerja perlu dibahas kembali.
- Adanya korban meninggal akibat penjambretan di jalan merupakan kejadian luar biasa yang memerlukan perhatian dari Kepolisian.
- Mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya dalam pemberantasan tindak pidana kriminalitas yang makin marak.
- mempertanyakan perkembangan permasalahan penyerobotan tanah di Bekasi, sudah ada putusan eksekusi, meminta penjelasan posisi kasus saat ini seperti apa?

- Sering terjadi demo di Kantor DPP PKB Jakarta Pusat, bermuatan politis dimana pendemo dibayar, meminta untuk disampaikan ke Kapolsek untuk dapat menghentikan hal-hal yang sifatnya mengganggu.
- Mengapresiasi Kapolda beserta jajarannya dalam menindak pelaku tindak kriminal yang jumlahnya sangat banyak.
- tidak melihat adanya keluhan tentang anggaran, bagaimana bentuk antisipasi baik dalam lingkup nasional dan internasional terhadap pengamanan Asian Games?
- Meminta Penjelasan Kapolda terhadap peristiwa di Mako Brimob.
- Tingkat permasalahan terkait teror cukup tinggi, bagaimana BNPT menyikapi hal ini dan juga dalam lingkup anggaran?
- Terkait Asian Games yang akan berlangsung bagaimana pengamanan agar berlangsung lancar dan juga koordinasi dengan BNPT terkait pencegahan potensi serangan terorisme. Kebijakan infrastruktur lalu lintas di Ibukota perlu diperhatikan dan perlu diantisipasi, bagaimana kalau pada saat pelaksanaan terjadi hambatan? Seberapa jauh kesiapan Polda Metro dalam mengantisipasi hal ini sebab tidak mudah melakukan pengamanan terhadap 45 Negara, perlu melibatkan personil di Polsek berbagai daerah.

IV. Penjelasan Kapolda dan Dir.BNPT

Kapolda

- 1) Penanganan terorisme ada kerjasama dan sinergi dengan BNPT. Pasca serangan Jawa Timur menempatkan personil tambahan dengan melekat pada Densus 88 untuk mendukung pengamanan Asian Games.
- 2) Persoalan ganjil genap masih masuk dalam tahap uji coba, juga menerapkan perluasan agar memenuhi ketentuan Komite Asian Games terkait jarak tempuh dari wisma atlet ke stadion.
- 3) Ditempat hiburan bekerjasama dengan BNN untuk membersihkan tempat hiburan dari narkoba.
- 4) Terkait penyerobotan tanah di Bekasi akan menindaklanjuti dengan Kapolres Bekasi terkait perkembangan kasus.
- 5) Semua kantor DPP dijaga personel Polisi.
- 6) Sejak tanggal 4 Juli melakukan operasi Kewilayahan terhadap begal yang membahayakan masyarakat.
- 7) Sudah menyiapkan tindakan kontingensi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pengamanan Asian Games.
- 8) Terkait persoalan narkoba bukan menerbitkan SP3 tetapi Crime Clearance.

BNPT

- 1) Persoalan deradikalisasi apabila dilihat dari program BNPT ada amantan narapidana yang melakukan serangan kembali, tidak semua pelaku mau mengikuti program deradikalisasi dan masih terpapar paham radikalisme sehingga mengulangi perbuatannya.
- 2) Penanganan penanggulangan terorisme harus dimulai dari hulu, yaitu pendidikan, sebab masuknya paham terorisme dimulai dari tauhid yang disodorkan kepada calon pelaku yang direkrut. Penting guru agama memiliki kemampuan yang komprehensif terhadap pemahaman agama.

Penutup

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB.

